KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAWAN KUSTIAWAN**

Jabatan : **Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOH. MAHFUD MD**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak PERTAMA pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak PERTAMA.

Pihak KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
MOH. MAHFUD MD	**WAWAN KUSTIAWAN**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
Tahun Anggaran : 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Dalam Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	100%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	85%
Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP	A
	2. Nilai PMPRB	23,37
	3. Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi (Skala 1-5)	4
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80

Jumlah Anggaran Program:
Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Bidang Politik Dalam Negeri Rp. 25.635.268.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Jakarta, Januari 2020

Menko Polhukam,

MOH. MAHFUD MD

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri,

WAWAN KUSTIAWAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUSLIH**

Jabatan : **Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WAWAN KUSTIAWAN**

Jabatan : **Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
WAWAN KUSTIAWAN	**MUSLIH**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
Tahun Anggaran : 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP	A
	2. Nilai Zona Integritas	86,20
	3. Nilai PMPRB	23,37
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi (skala 1-5)	4
	5. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80

Jumlah Anggaran:
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Rp.1.332.057.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Jakarta, Januari 2020

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri,

WAWAN KUSTIAWAN

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri,

MUSLIH

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUDI SUSANTO**

Jabatan : **Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WAWAN KUSTIAWAN**

Jabatan : **Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
WAWAN KUSTIAWAN	**BUDI SUSANTO**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
Tahun Anggaran : 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Penyelesaian Permasalahan Bidang Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil lintas sektoral yang efektif	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Demokrasi dan Masyarakat Sipil;	2
	2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil yang mendukung dokumen perencanaan nasional	100%
	3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil yang ditindaklanjuti	50%
Penyusunan Laporan IDI yang Optimal	1. Jumlah Laporan Penyusunan IDI	1
	2. Jumlah laporan IDI yang dimanfaatkan Menko Polhukam	1

Jumlah Anggaran:
Kegiatan Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil Rp.10.082.762.000,- (Sepuluh Milyar Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)

Jakarta, Januari 2020

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri,

WAWAN KUSTIAWAN

Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil,

BUDI SUSANTO

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : **Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WAWAN KUSTIAWAN, S.H**

Jabatan : **Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua, **Pihak Pertama,**

WAWAN KUSTIAWAN

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
Tahun Anggaran : 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Penyelesaian Permasalahan Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah lintas sektoral yang efektif	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah	2
	2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang mendukung dokumen perencanaan nasional	100%
	3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	50%

Jumlah Anggaran:
Kegiatan Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Rp.1.703.050.000,-
(Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)

Jakarta, Januari 2020

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri,

Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah,

WAWAN KUSTIAWAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSRAN YUNUS**

Jabatan : **Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WAWAN KUSTIAWAN**

Jabatan : **Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
WAWAN KUSTIAWAN	**YUSRAN YUNUS**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
Tahun Anggaran : 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Penyelesaian Permasalahan Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik lintas sektoral yang efektif	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Pengelolaan Pemilu & Penguatan Partai Politik	2
	2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik yang mendukung dokumen perencanaan nasional	100%
	3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik yang ditindaklanjuti	50%
Penyelesaian Permasalahan Pemilu/Pemilukada yang optimal	4. Jumlah Laporan Desk Pemilu/Pemilukada	1
	5. Jumlah Laporan Desk Pemilu/Pemilukada Yang ditindaklanjuti Menko	1

Jumlah Anggaran:
Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik Rp.3.352.399.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Jakarta, Januari 2020

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri,

WAWAN KUSTIAWAN

Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik,

YUSRAN YUNUS

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DANU PRIONGGO**

Jabatan : **Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WAWAN KUSTIAWAN**

Jabatan : **Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
WAWAN KUSTIAWAN	**DANU PRIONGGO**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
Tahun Anggaran : 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Penyelesaian Permasalahan Bidang Otonomi Khusus lintas sektoral yang efektif	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Otonomi Khusus	1
	2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Otonomi Khusus yang mendukung dokumen perencanaan nasional	100%
	3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Otonomi Khusus yang ditindaklanjuti	100%
Penyelesaian Permasalahan Otonomi Khusus pada daerah rawan yang optimal	1. Jumlah Laporan Desk Otonomi Khusus	4
	2. Jumlah Laporan Desk Otonomi Khusus Yang ditindaklanjuti Menko	4

Jumlah Anggaran:
Kegiatan Koordinasi Otonomi Khusus Rp.9.165.000.000,- (sembilan Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)

Jakarta, Januari 2020

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri,

WAWAN KUSTIAWAN

Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus,

DANU PRIONGGO

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SIDIK**

Jabatan : **Kepala Bidang Penguatan Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUDI SUSANTO**

Jabatan : **Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
BUDI SUSANTO	**SIDIK**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON III
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil

Tahun Anggaran : 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Formulasi Identifikasi Masalah dan Agenda Setting yang Kredibel	Jumlah Laporan Identifikasi Masalah dan Agenda Setting Bidang Penguatan Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi	2
Perumusan Analisis Kebijakan yang Komprehensif	Jumlah Laporan Analisis Kebijakan Bidang Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi	2
Penyusunan Draft Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas	1. Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi	2
	2. Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi yang sesuai dokumen perencanaan nasional	100%
Tindaklanjut Draft Rekomendasi Kebijakan yang efektif	Persentase Draft Rekomendasi yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Demokrasi dan OMS	50%

Jakarta, Januari 2020

Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil

BUDI SUSANTO

Kepala Bidang Penguatan Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi

SIDIK

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HARZENI PAINE**

Jabatan : **Kepala Bidang Pengawasan Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Masyarakat Asing**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUDI SUSANTO**

Jabatan : **Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
BUDI SUSANTO	**HARZENI PAINE**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON III
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil

Tahun Anggaran : 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Formulasi Identifikasi Masalah dan Agenda Setting yang Kredibel	Jumlah Laporan Identifikasi Masalah dan Agenda Setting Bidang Organisasi Masyarakat Sipil	2
Perumusan Analisis Kebijakan yang Komprehensif	Jumlah Laporan Analisis Kebijakan Bidang Organisasi Masyarakat Sipil	2
Penyusunan Draft Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas	1. Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Organisasi Masyarakat Sipil	2
	2. Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Organisasi Masyarakat Sipil yang sesuai dokumen perencanaan nasional	100%
Tindaklanjut Draft Rekomendasi Kebijakan yang efektif	Persentase Draft Rekomendasi Yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Demokrasi dan OMS	50%

Jakarta, Januari 2020

Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil

BUDI SUSANTO

Kepala Bidang Pengawasan Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Masyarakat Asing

HARZENI PAINE

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SURANTO**

Jabatan : **Kepala Bidang Desentralisasi**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan : **Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SURANTO

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON III
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Tahun Anggaran : 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Formulasi Identifikasi Masalah dan Agenda Setting yang Kredibel	Jumlah Laporan Identifikasi Masalah dan Agenda Setting Bidang Desentralisasi	1
Perumusan Analisis Kebijakan yang Komprehensif	Jumlah Laporan Analisis Kebijakan Bidang Desentralisasi	1
Penyusunan Draft Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas	1. Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Desentralisasi	1
	2. Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Desentralisasi yang sesuai dokumen perencanaan nasional	100%
Tindaklanjut Draft Rekomendasi Kebijakan yang efektif	Persentase Draft Rekomendasi Yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah	100%

Jakarta, Januari 2020

Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah,

Kepala Bidang Desentralisasi,

SURANTO

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IWAN SUMANTRI**

Jabatan : **Kepala Bidang Otonomi Daerah**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan : **Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

IWAN SUMANTRI

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON III
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Tahun Anggaran : 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Formulasi Identifikasi Masalah dan Agenda Setting yang Kredibel	Jumlah Laporan Identifikasi Masalah dan Agenda Setting Bidang Otonomi Daerah	1
Perumusan Analisis Kebijakan yang Komprehensif	Jumlah Laporan Analisis Kebijakan Bidang Otonomi Daerah	1
Penyusunan Draft Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas	1. Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Otonomi Daerah	1
	2. Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Otonomi Daerah yang sesuai dokumen perencanaan nasional	100%
Tindaklanjut Draft Rekomendasi Kebijakan yang efektif	Persentase Draft Rekomendasi Yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah	100%

Jakarta, Januari 2020

Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah,

Kepala Bidang Otonomi Daerah,

IWAN SUMANTRI

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JOHANIS PAYUNG**

Jabatan : **Kepala Bidang Pengelolaan Pemilu Dan Pemilihan Kepala Daerah**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YUSRAN YUNUS**

Jabatan : **Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
YUSRAN YUNUS	**JOHANIS PAYUNG**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON III
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik

Tahun Anggaran : 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Formulasi Identifikasi Masalah dan Agenda Setting yang Kredibel	Jumlah Laporan Identifikasi Masalah dan Agenda Setting Bidang Pengelolaan Pemilu,	1
Perumusan Analisis Kebijakan yang Komprehensif	Jumlah Laporan Analisis Kebijakan Bidang Pengelolaan Pemilu	1
Penyusunan Draft Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas	1. Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Pemilu	1
	2. Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Pengelolaan Pemilu yang sesuai dokumen perencanaan nasional	100%
Tindaklanjut Draft Rekomendasi Kebijakan yang efektif	Persentase Draft Rekomendasi Yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik	100%

Jakarta, Januari 2020

Asisten Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik,

YUSRAN YUNUS

Kepala Bidang Pengelolaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah,

JOHANIS PAYUNG

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SIGIT HARYONO**

Jabatan : **Kepala Bidang Penguatan Partai Politik**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YUSRAN YUNUS**

Jabatan : **Asisten Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
YUSRAN YUNUS	**SIGIT HARYONO**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON III
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik

Tahun Anggaran : 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Formulasi Identifikasi Masalah dan Agenda Setting yang Kredibel	Jumlah Laporan Identifikasi Masalah dan Agenda Setting Bidang Penguatan Partai Politik	1
Perumusan Analisis Kebijakan yang Komprehensif	Jumlah Laporan Analisis Kebijakan Bidang Penguatan Partai Politik	1
Penyusunan Draft Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas	1. Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Penguatan Partai Politik	1
	2. Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Penguatan Partai Politik yang sesuai dokumen perencanaan nasional	100%
Tindaklanjut Draft Rekomendasi Kebijakan yang efektif	Persentase Draft Rekomendasi Yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik	100%

Jakarta, Januari 2020

Asisten Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik,

YUSRAN YUNUS

Kepala Bidang Penguatan Partai Politik,

SIGIT HARYONO

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ALMUCHALIF SURYO**

Jabatan : **Kepala Bidang Otonomi Khusus Provinsi, Papua dan Papua Barat**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DANU PRIONGGO**

Jabatan : **Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
DANU PRIONGGO	**ALMUCHALIF SURYO**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON III
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus.
Tahun Anggaran : 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Formulasi Identifikasi Masalah dan Agenda Setting yang Kredibel	Jumlah Laporan Identifikasi Masalah dan Agenda Setting Bidang Otonomi Khusus Provinsi, Papua dan Papua Barat	1
Perumusan Analisis Kebijakan yang Komprehensif	Jumlah Laporan Analisis Kebijakan Bidang Otonomi Khusus Provinsi, Papua dan Papua Barat	1
Penyusunan Draft Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas	1. Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Otonomi Khusus Provinsi, Papua dan Papua Barat	1
	2. Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Otonomi Khusus Provinsi, Papua dan Papua Barat yang sesuai dokumen perencanaan nasional	100%
Tindaklanjut Draft Rekomendasi Kebijakan yang efektif	Persentase Draft Rekomendasi Yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Otonomi Khusus	100%

Jakarta, Januari 2020

Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus,

DANU PRIONGGO

Kepala Bidang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat,

ALMUCHALIF SURYO

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ADE IKHWAN**

Jabatan : **Kepala Bidang Otonomi Khusus Provinsi Aceh, DKI Jakarta dan D.I Yogyakarta**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DANU PRIONGGO**

Jabatan : **Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
DANU PRIONGGO	**ADE IKHWAN**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON III
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus.
Tahun Anggaran : 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Formulasi Identifikasi Masalah dan Agenda Setting yang Kredibel	Jumlah Laporan Identifikasi Masalah dan Agenda Setting Bidang Otonomi Khusus Provinsi, Aceh, DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta,	1
Perumusan Analisis Kebijakan yang Komprehensif	Jumlah Laporan Analisis Kebijakan Bidang Otonomi Khusus Provinsi, Aceh, DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta	1
Penyusunan Draft Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas	1. Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Otonomi Khusus Provinsi, Aceh, DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta	1
	2. Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Otonomi Khusus Provinsi, Aceh, DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta yang sesuai dokumen perencanaan nasional	100%
Tindaklanjut Draft Rekomendasi Kebijakan yang efektif	Persentase Draft Rekomendasi Yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Otonomi Khusus	100%

Jakarta, Januari 2020

Asisten Koordinasi Otonomi Khusus,

DANU PRIONGGO

Kepala Bidang Otonomi Khusus Provinsi Aceh, DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta,

ADE IKHWAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PUJIANTO**

Jabatan : **Kepala Bagian Program dan Evaluasi**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUSLIH**

Jabatan : **Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
MUSLIH	**PUJIANTO**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON III
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon II : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Tahun Anggaran : 2020

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Pemenuhan Layanan Dukungan Program dan Evaluasi yang Optimal	1. Persentase Implementasi SAKIP pada Deputii bidkoor Politik Dalam Negeri	80%
	2. Persentase implementasi Rencana Aksi Area Perubahan Reformasi Birokrasi Bidang Perencanaan dan Evaluasi pada Deputi bidkoor Politik Dalam Negeri	80%
	3. Persentase ketepatan waktu tindaklanjut dokumen Perencanaan dan Evaluasi	100%
	4. Skor Indeks Layanan Kepuasan Perencanaan dan Evaluasi	4

Jakarta, Januari 2020

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri,

MUSLIH

Kepala Bagian Program dan Evaluasi,

PUJIANTO

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RINI UTAMI**

Jabatan : **Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUSLIH**

Jabatan : **Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
MUSLIH	**RINI UTAMI**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON III
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon II : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
Tahun Anggaran : 2020

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Pemenuhan Layanan Dukungan Tata Usaha dan Umum yang Optimal	1. Persentase implementasi Rencana Aksi Area Perubahan Reformasi Birokrasi Bidang Tata Usaha dan Umum pada Deputi bidkoor Politik Dalam Negeri	80%
	2. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024	1
	3. Persentase implementasi Rencana Aksi Zona Integritas menuju WBK pada Deputi	80%
	4. Persentase ketepatan waktu tindaklanjut dokumen administrasi umum	100%
	5. Skor Indeks Layanan Kepuasan Tata Usaha dan Umum	4

Jakarta, Januari 2020

Sekretaris Deputi Bidang Koorddinasi Politik Dalam Negeri,

MUSLIH

Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha,

RINI UTAMI

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YULIUS YUWONO SAPUTRA**

Jabatan : **Kepala Subbagian Tata Usaha**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RINI UTAMI**

Jabatan : **Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
RINI UTAMI	**YULIUS YUWONO SAPUTRO**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON IV
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon III : Bagian Tata Usaha dan Umum Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
Tahun Anggaran : 2020

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Pemenuhan Layanan Tata Usaha yang Optimal	1. Jumlah dokumen implementasi Rencana Aksi Area Perubahan Reformasi Birokrasi Bidang Tata Usaha dan Umum pada Deputi bidkoor Politik Dalam Negeri Yang terpenuhi	7
	2. Jumlah dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024	1
	3. jumlah laporan tindaklanjut dokumen administrasi umum	12

Jakarta, Januari 2020

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum,

RINI UTAMI

Kepala Sub Bagian Tata Usaha,

YULIUS YUWONO SAPUTRO

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NANO SARYANTO**

Jabatan : **Kepala Subbagian Umum**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RINI UTAMI**

Jabatan : **Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
RINI UTAMI	**NANO SARYANTO**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON IV
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon III : Bagian Tata Usaha dan Umum Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
Tahun Anggaran : 2020

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Pemenuhan Layanan Umum yang Optimal	1. Penyusunan laporan pengelolaan sistem informasi dan kepegawaian	4
	2. jumlah dokumen implementasi Rencana Aksi Zona Integritas menuju WBK pada Deputi bidkoor Politik Dalam Negeri yang terpenuhi	4
	3. Jumlah laporan pengelolaan arsip	12

Jakarta, Januari 2020

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum,

RINI UTAMI

Kepala Sub Bagian Umum,

NANO SARYANTO

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SIMON SEMBIRING**

Jabatan : **Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **PUJIANTO**

Jabatan : **Kepala Bagian Program dan Evaluasi**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
PUJIANTO	**SIMON SEMBIRING**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON III
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon III : Bagian Program dan Evaluasi Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Tahun Anggaran : 2020

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Pemenuhan Layanan Evaluasi yang Optimal	1. Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi yang terpenuhi	4
	2. Jumlah dokumen penyusunan evaluasi kinerja dalam SAKIP yang terpenuhi	4
	3. Persentase jumlah dokumen evaluasi yang diselesaikan tepat waktu	100%

Jakarta, Januari 2020

Kepala Bagian Program dan Evaluasi,

PUJIANTO

Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi,

SIMON SEMBIRING

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FAJAR RIYANTO**

Jabatan : **Kepala Subbagian Penyusunan Program**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **PUJIANTO**

Jabatan : **Kepala Bagian Program dan Evaluasi**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
PUJIANTO	**FAJAR RIYANTO**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON IV
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon III : Bagian Program dan Evaluasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Tahun Anggaran : 2020

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Pemenuhan Layanan Perencanaan yang Optimal	1. Jumlah dokumen penyusunan perencanaan kinerja dalam SAKIP yang terpenuhi	4
	2. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	4
	3. Persentase jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	100%

Jakarta, Januari 2020

Kepala Bagian Program dan Evaluasi,

PUJIANTO

Kepala Subbagian Penyusunan Program,

FAJAR RIYANTO